BAB III

PANDANGAN MOHAMMAD HATTA DAN ABRAHAM LINCOLN TERHADAP DEMOKRASI

3.1. Pandangan Mohammad Hatta Terhadap Demokrasi

Mohammad Hatta, sebagai seorang tokoh politik Indonesia, memiliki pandangan yang kritis terhadap konsep demokrasi ala Barat. Dia mengemukakan pandangannya tentang demokrasi Barat dengan mempertimbangkan latar belakang kolonialisme dan pengalaman Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Hatta menyadari bahwa konsep demokrasi yang berkembang di Barat telah tumbuh dan dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya, dan sosial masyarakat Barat. Sebagian besar negara Barat telah mengalami perkembangan politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda dari negara-negara seperti Indonesia yang mengalami kolonialisme.[53]

Hatta meragukan universalitas konsep demokrasi ala Barat karena setiap negara memiliki budaya, sejarah, dan kondisi yang unik. Ia percaya bahwa demokrasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal masyarakatnya, dan tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan konteksnya. Hatta menyadari bahwa konsep demokrasi ala Barat telah dihadapi oleh kekuatan kolonial dan imperialistik yang mencoba mendiktekan sistem politik mereka kepada negara-negara jajahan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh

[53] Imran, Amin. 1984. *Mohammad Hatta*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

mana demokrasi yang diusung adalah upaya untuk mengakui kedaulatan dan kemandirian suatu bangsa, atau hanya sebagai alat legitimasi kekuasaan luar.[54]

Hatta melihat adanya asimetri kekuatan di antara negara-negara Barat dan negara-negara non-Barat. Negara-negara Barat sering memiliki keuntungan ekonomi dan politik yang besar atas negara-negara lain, sehingga membuatnya sulit bagi negara-negara non-Barat untuk sepenuhnya menerapkan konsep demokrasi ala Barat tanpa mempertimbangkan pengaruh asing yang besar. Dia berpendapat bahwa demokrasi Barat cenderung individualistik dan terfokus pada hak-hak individu, tanpa mempertimbangkan kepentingan kolektif dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dia percaya bahwa demokrasi seharusnya lebih dari sekadar hak-hak individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab kolektif untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Hatta juga menyoroti ketidaksetaraan dalam sistem politik dan ekonomi yang ada dalam konsep demokrasi Barat. Dia mengkritik dominasi elit politik dan ekonomi yang memiliki kekuasaan yang tidak seimbang, yang berdampak pada ketimpangan sosial dan ekonomi. Hatta menekankan pentingnya persamaan hak bagi semua warga negara. Demokrasi sejati yang sesuai dengan pandangannya adalah yang mengakui hak dan kesempatan yang sama setiap warga negara, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial tanpa adanya diskriminasi. Pandangan Hatta, demokrasi seharusnya lebih inklusif, memperhatikan nilai-nilai dan kearifan lokal, serta melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Dia menekankan

[54] Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

pentingnya membangun sistem politik yang responsif dan berpusat pada kepentingan rakyat.

Meskipun Hatta memiliki pandangan yang kritis terhadap konsep demokrasi ala Barat, ia juga mengakui nilai-nilai positif dalam demokrasi tersebut, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat. Namun, ia menyatakan bahwa konsep demokrasi perlu diadaptasi mengkombinasikan nilai-nilai lokal dan universal dalam membangun demokrasi agar sesuai dengan situasi dan kebutuhan Indonesia serta negara-negara yang mengalami pengalaman serupa.[55] Hatta mendorong agar demokrasi tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan keadilan yang lebih luas.

3.1.1. Demokrasi Kedaulatan Rakyat

Demokrasi kedaulatan rakyat menurut Mohammad Hatta,yang merupakan system yang dirancang untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Demokrasi yang dirancang oleh Hatta di Indonesia memiliki perbedaan signifikan dengan demokrasi Barat. Dia melihat kelemahan dalam demokrasi Barat dan menganggap perlu menyusun konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Hatta menyatakan bahwa ada tiga sumber pokok demokrasi yang sudah mengakar di Indonesia. Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, yang juga merupakan tujuan dalam demokrasi ini. Kedua, ajaran Islam yang mengajarkan untuk menciptakan kebenaran dan keadilan

[55] Feith, H. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Tuhan dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme yang sudah ada dalam desa-desa di wilayah Indonesia. Hatta meyakini bahwa tiga sumber ini akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia.[56]Menurut Hatta, ketiga sumber tersebut akan menjadi jaminan bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Ia percaya bahwa berdasarkan pengalamannya di benua Barat dan pengetahuan tentang masyarakat desa Indonesia, demokrasi kedaulatan rakyat dapat dijadikan sebagai dasar pemerintahan Republik Indonesia. Hatta menyatakan bahwa demokrasi kedaulatan rakyat mengandung dua aspek, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Ia yakin bahwa konsep ini dapat dengan mudah diimplementasikan karena masyarakat Indonesia cenderung pada pola hidup kolektivisme.

Hatta menekankan bahwa individualisme dianggapnya sebagai penyakit yang harus dihindari. Oleh karena itu, ia menolak demokrasi yang menekankan individualisme, karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Hatta menganggap bahwa konsep demokrasi kedaulatan rakyat yang lebih berfokus pada kepentingan bersama dan menghargai nilai-nilai kolektivisme merupakan kunci untuk mencapai demokrasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Pandangan Hatta terhadap upaya untuk mengoreksi kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi yang saat itu telah terjadi. Hatta menyadari bahwa demokrasi dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan modal untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, Hatta berusaha

[56] Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia.* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

menciptakan demokrasi yang mengoreksi ketidakseimbangan tersebut dan menempatkan kekuasaan politik di tangan rakyat.[57]

Untuk ini, Hatta mengemukakan beberapa aspek yang penting. Pertama, kebebasan berserikat dan berorganisasi. Hatta menganggap bahwa organisasi adalah kekuatan pengimbang yang dapat mencegah dominasi kelompok modal, kelompok bersenjata, dan kelompok politik yang mendominasi. Kedua, kebebasan menyatakan pendapat dalam tulisan dan lisan. Hatta menentang sensor pers dan memperjuangkan agar pendapat tidak dipaksa, sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang berorientasi indoktrinasi. Selanjutnya, Hatta merujuk pada konsep hak sanggah secara massal, sebuah praktik yang telah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat desa di Jawa, di mana tindakan tersebut dilakukan tanpa menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk menyuarakan ketidakpuasan atau keberatan terhadap suatu kebijakan atau tindakan tertentu. Hal ini penting untuk memberikan ruang bagi rakyat dalam menyuarakan keberatan mereka. Selain itu, Hatta menekankan pentingnya semangat gotong royong, rasa solidaritas, dan kolektivitas dalam masyarakat untuk bersama-sama menerima atau menolak sesuatu.

Hatta juga mendorong untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan aksesibilitas bagi mereka yang berada dalam kelompok ekonomi rendah dalam pengelolaan sumber daya alam, memberikan mereka kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Selain itu, Hatta juga mendorong agar masyarakat kecil bisa lebih mudah

[57] Hatta, Mohammad. 1978. *Indonesia Merdeka*. Jakarta: Bulan Bintang.

mendapatkan modal dan kredit dari lembaga perbankan, sehingga mereka memiliki dukungan finansial untuk mengembangkan usaha mereka. Tidak hanya itu, Hatta juga menekankan pentingnya aksesibilitas pada berbagai fasilitas penting seperti pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, Hatta juga memperjuangkan aksesibilitas pada pasar yang adil serta pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, Hatta melihat pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan hanya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga sebagai langkah menuju kesetaraan, keadilan, dan kemajuan sosial yang lebih luas.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya, Hatta meyakini bahwa konsep demokrasi politik akan secara harmonis bersinkronisasi dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam wadah konseptual demokrasi yang sesungguhnya, yang menempatkan kedaulatan pada tangan rakyat. Pada saat yang sama, rakyat dihadapkan pada tugas untuk menciptakan medan kerja yang adil dan seimbang melalui kebijakan pembangunan strategi yang dirancang untuk memberikan prioritas, menyediakan akses informasi yang memadai serta perlindungan yang lebih baik bagi segmen masyarakat yang rentan dan kurang mampu secara ekonomi. Namun, Hatta juga menekankan bahwa demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan tanggung jawab dan toleransi dari rakyat itu sendiri.[58] Menurut Hatta mengenai demokrasi yang lebih sempurna dan sesuai

[58] Hatta, Mohammad. 2014. *Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi*. Bantul: Kreasi Wacana.

dengan tradisi masyarakat Indonesia. Hatta berusaha menuju demokrasi yang utuh, yaitu demokrasi yang mencakup aspek politik dan ekonomi tanpa mengandung paham individualisme.

Hatta yakin bahwa demokrasi yang dibayangkannya dapat terwujud karena sesuai dengan kebersamaan dan kekeluargaan yang merupakan tradisi masyarakat Indonesia. Dalam karya-karyanya yang mengulas konsep Demokrasi Asli Indonesia dan Kedaulatan Rakyat, Hatta secara konsisten mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan identitas budaya dan nilai-nilai yang mendasari masyarakat Indonesia asli. Dia mendalami konsep-konsep yang khas bagi mereka, seperti model demokrasi berbasis desa, proses rapat yang bijak, semangat kolektivisme, praktik musyawarah untuk mencapai mufakat, serta pentingnya gotong-royong dan solidaritas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bertujuan untuk menyediakan dasar yang diperkuat oleh bukti empiris dari sudut pandang sosiologis untuk mendukung dan memperjuangkan konsep demokrasi tersebut, agar konsep demokrasi tersebut dapat diintegrasikan dengan lebih baik ke dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan sosial.

Hatta hanya mengacu pada nilai-nilai luhur yang menghidupi jalinan sosial dalam kehidupan masyarakat pribumi Indonesia, seperti semangat gotong royong, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan, untuk membangun demokrasi di Indonesia. Dia tidak mengambil masyarakat asli itu sendiri sebagai bentuk kehidupan faktual di masa lalu. Penting untuk memahami perbedaan antara kedua istilah ini, hal ini menunjukkan bahwa Hatta tidak berusaha untuk merekonstruksi masyarakat asli Indonesia secara menyeluruh. Dia hanya mengambil semangat dan nilai-nilai

positif yang ada dalam masyarakat tersebut. Dengan pendekatan ini, Hatta berusaha membangun demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat untuk mencapai demokrasi yang lebih baik dan lebih relevan di Indonesia.[59]

Sifat demokratis kebergantungan pada warga pribumi Indonesia berasal dari semangat kebersamaan atau kolektivisme yang kuat yang merasuk di dalam jiwa setiap individu dalam komunitas pribumi, di mana setiap aspek kehidupan individu dianggap sebagai bagian integral dari keseluruhan kehidupan masyarakat. Semangat ini mengilhami rasa tanggung jawab dan keterlibatan yang dalam terhadap kesejahteraan dan keberhasilan bersama. Hatta menjelaskan konsep kolektivisme sebagai kepemilikan bersama dan kerja sama secara bersama-sama. Dia menguraikan bahwa di struktur masyarakat pribumi Indonesia, kolektivisme atau semangat kebersamaan melahirkan tiga ciri penting. Pertama adalah rapat atau musyawarah, yang merupakan cara untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Kedua adalah mufakat, yaitu mencapai kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga adalah tolong-menolong, yang berkaitan dengan cara-cara mengatasi masalah bersama dengan saling membantu.

Hatta juga menyebutkan selain tiga ciri tersebut, yaitu dua kebiasaan lain yang hidup dalam masyarakat asli Indonesia. Pertama, kebiasaan melakukan protes bersama terhadap peraturan penguasa yang dianggap tidak adil atau memberatkan, atau ketika penguasa tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Kedua, adalah

[59] Swasono, Sri-Edi. 2002. *Bung Hatta: Bapak Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Hatta.

kecenderungan untuk menghindar dari pusat kekuasaan, seperti yang terlihat dalam tradisi sosial masyarakat Bugis dan Minangkabau yang memilih untuk menjauh dari wilayah kekuasaan penguasa. Hatta mengemukakan pandangannya bahwa masyarakat pribumi Indonesia di berbagai daerah pada masa lampau memiliki lima karakteristik hidup yang telah menjadi bagian dari tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kelima karakteristik ini menggambarkan semangat solidaritas dan prinsip-prinsip demokrasi termasuk dalam domain ekonomi, sosial, dan politik yang tercermin dalam segala aspek kehidupan.[60] Kesimpulannya, Hatta menyatakan bahwa semangat kebersamaan dan kolektivisme dalam masyarakat asli Indonesia menjadi landasan penting untuk menciptakan demokrasi yang kuat dan berakar dalam kehidupan masyarakat. Hatta memandang lima ciri ini sebagai ciri-ciri yang perlu dijadikan contoh dalam membangun masyarakat yang lebih demokratis di Indonesia.

3.1.2. Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi adalah konsep yang digagas oleh Hatta yang mengedepankan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep ini diterjemahkan dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, yang mengatur perekonomian dan juga menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan keadilan sosial. Ciri-ciri ekonomi kerakyatan mengandung unsur populis, berkeadilan sosial, dan demokratis, dengan tujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, bukan hanya untuk individu seperti dalam sistem ekonomi kapitalis. Dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, Hatta memandang pentingnya koperasi sebagai sarana untuk

[60] Widjaja, Albert. 1982. *Budaya Politik dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES

menghapuskan kesenjangan ekonomi.[61] Untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi, Hatta menyebutnya sebagai "ekonomi terpimpin" dan mengatur pembagian pengelolaan ekonomi nasional dalam tiga bagian. Pertama, negara menguasai cabang produksi penting dan sumber daya alam dengan tujuan memakmurkan rakyat. Kedua, koperasi menguasai sektor ekonomi kerakyatan yang melibatkan banyak rakyat Indonesia. Pihak swasta merupakan pelaku ekonomi ketiga yang menguasai kegiatan di antara yang dikuasai oleh negara dan koperasi.

Hatta mengakui bahwa politik kemakmuran harus mempertimbangkan keadaan jangka panjang dan pendek. Politik perekonomian jangka panjang mencakup upaya menyelenggarakan ekonomi berdasarkan koperasi, membangun semangat koperasi di tengah masyarakat. Sementara itu, politik perekonomian jangka pendek harus dapat membawa kemakmuran yang nyata dan mengurangi kekurangan ekonomi rakyat. Meskipun mewujudkan demokrasi ekonomi adalah tugas yang sulit, Hatta menegaskan bahwa usaha ini harus terus diupayakan dengan kesabaran dan keyakinan yang kuat. Perjalanan menuju kemakmuran berjangka panjang dan pendek harus dilakukan dengan tindakan nyata yang dapat memperbaiki keadaan rakyat. Selain koperasi, bangunan-bangunan perusahaan yang diawasi atau tidak oleh negara juga berperan dalam mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat.

Dalam upaya menghadapi tantangan ini, Hatta menegaskan bahwa kesatuan politik dan ekonomi perlu dijaga dengan baik, sehingga demi kemakmuran masyarakat, langkah-langkah tegas dan bijaksana harus diambil, baik untuk jangka

[61] Swasono, Sri Edi. 1983. *Koperasi Didalam Orde Ekonomi Indonesia*. Jakarta: UI – Press.

panjang maupun pendek. Dalam konsep demokrasi ekonomi yang digagas Hatta, rakyat memegang peranan penting dalam perekonomian. Salah satu sarana untuk mewujudkannya adalah melalui koperasi, sebuah badan usaha bersama yang beranggotakan orang-orang dengan ekonomi lemah. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya secara adil dan berkerjasama. Pengaruh koperasi dimulai dari Eropa pasca Revolusi Industri dan menyebar ke Indonesia melalui kolonialisme. Hatta melihat koperasi sebagai landasan utama bagi demokrasi politik, karena mendorong rasa tanggung jawab dan kesadaran kolektif pada rakyat. Baginya, koperasi dan demokrasi saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain.[62] Tujuan utama koperasi adalah menyelenggarakan keperluan hidup bersama secara baik dan memperbaiki nasib orang yang kurang ekonominya melalui kerjasama. Hatta menyamakan koperasi dengan sapu lidi, di mana kekuatan terletak pada persatuan dan kerjasama anggotanya, bukan semata-mata mencari keuntungan seperti firma atau perusahaan. Meskipun koperasi dapat mencapai keuntungan, tujuan utamanya adalah membela keperluan orang kecil dan memenuhi kebutuhan hidup dengan biaya seminimal mungkin.

Demokrasi ekonomi dengan koperasi ini menjadi upaya Hatta untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam pembangunan nasional. Hatta menjelaskan bahwa dalam koperasi, terdapat asas kolektivisme di mana anggota memiliki kedudukan yang sejajar dan sama rata. Tidak ada perbedaan antara majikan dan buruh karena semua bekerja

[62] Arief, Sritua. 2002 *"Ekonomi Kerakyatan Indonesia : Mengenang Bung Hatta,Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia"*. Surakarta: Mohamadiyah University Press. hlm. 104

bersama untuk memajukan koperasi. Koperasi diibaratkan sebagai persekutuan keluarga, di mana anggota memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun koperasi dengan semangat gotong-royong. Dalam koperasi, terdapat lima pokok dasar yang tidak boleh diubah-ubah, yaitu: pengelolaan koperasi dilakukan oleh anggota sendiri, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, semua orang dapat menjadi anggota koperasi, keuntungan dibagi sesuai dengan jasa mereka dalam memajukan koperasi, dan bagian dari keuntungan digunakan untuk pendidikan.[63] Selain itu, terdapat juga dasar-dasar moral dalam koperasi, seperti tidak menjual barang palsu, menjaga kejujuran dalam ukuran dan timbangan, harga barang harus sama dengan harga setempat, dan bertransaksi dengan kontan. Meskipun koperasi memiliki prinsip yang baik, dalam prakteknya masih ada kekurangan dan perlu usaha untuk bersaing dengan pedagang swasta yang memiliki modal besar. Mewujudkan masyarakat koperasi Indonesia membutuhkan kemampuan dan usaha yang terus-menerus. Dengan propaganda dan pelatihan yang tepat, diharapkan koperasi dapat dikelola dengan profesional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan.

3.1.3. Demokrasi Politik

Hatta memiliki obsesi yang kuat untuk membangun negara Indonesia menjadi maju dan demokratis. Dalam pemikiran politiknya, tujuan ini menjadi inti dari segala upayanya. Gagasan tentang pendidikan politik Hatta muncul karena kesadarannya sebagai bangsa yang pernah terjajah. Keyakinannya tentang

[63] Hatta, Mohammad. 1953. *Kooperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Kementrian Penerangan.

pentingnya pendidikan politik didasarkan pada pandangan bahwa “politik di negeri terjajah terutama dalam bidang pendidikan”, yang mencakup bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan dalam arti yang lebih luas. Menurut Hatta, melalui pendidikan, rakyat Indonesia akan menyadari bahwa tanggung jawab membangun negara bukan hanya tugas pemimpin, tetapi juga kewajiban setiap orang. Pemimpin tidak bisa mencapai kemerdekaan Indonesia tanpa usaha dan keyakinan massa rakyat. Hatta meyakini bahwa nasib bangsa Indonesia terletak di tangan rakyat itu sendiri, dan kebebasan yang sejati hanya akan tercapai jika rakyat berjuang bersama.[64]

Tidak hanya berhenti pada meraih kemerdekaan, Hatta percaya bahwa perjuangan bangsa Indonesia harus berlanjut untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan politik menjadi alat untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang mampu membangun bangsa. Selain itu, pendidikan politik juga diperlukan untuk memberdayakan rakyat secara umum agar memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang kuat dalam mencapai cita-cita bangsa. Gagasan Hatta tentang pendidikan politik sering kali dibicarakan dalam konteks perbedaan strategi dengan Soekarno. Soekarno lebih memilih pendekatan penggalangan massa dalam perjuangan kemerdekaan, sementara Hatta lebih condong pada pendekatan pendidikan politik yang sistematis untuk membentuk kesadaran kolektif dan tanggung jawab bersama rakyat. Bagi Hatta, pendidikan politik adalah fondasi yang vital dalam membangun masyarakat

[64] Hatta, Mohammad. 1945. *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Pustaka Rakjat.

yang aktif, bertanggung jawab, dan berdaya saing untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, maju, dan demokratis.[65]

Keyakinan Hatta mengenai pentingnya pendidikan politik mencerminkan pandangannya yang menentang penumpukan kekuasaan di tangan seorang pemimpin yang dianggap memiliki aura mitos. Baginya, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Hatta melihat bahwa pendidikan politik adalah cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberdayakan rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran politik yang kuat. Awalnya, Hatta membicarakan pendidikan politik terutama untuk kader partai atau calon pemimpin di masa depan. Namun, dengan sistem banyak partai yang diterapkan, pandangannya berkembang menjadi keyakinan bahwa seluruh komponen bangsa harus memiliki kesadaran politik. Ia menyadari bahwa tanggung jawab untuk memperjuangkan cita-cita bangsa tidak bisa hanya bergantung pada kemauan seorang pemimpin dan kelompoknya saja. Semua warga negara harus turut aktif dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan tujuan bangsa.

Dalam pandangan Hatta, masyarakat madani (civil society) menjadi kunci penting dalam memperkuat pendidikan politik. Konsep masyarakat madani menekankan peran aktif warga negara dalam proses pembangunan negara, termasuk dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Hatta sebenarnya sudah merenungkan tentang pentingnya penguatan masyarakat madani jauh sebelum istilah ini dikenal secara luas.[66] Dengan demikian, Hatta tidak hanya

[65] Hatta, Mohammad. 1957. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*. Jakarta: Tintamas.
[66] Suryo, Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

menganggap pendidikan politik sebagai upaya untuk membentuk calon pemimpin yang berkualitas, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kesadaran politik dan partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan bangsa. Prinsip ini membawa esensi demokrasi dan membantu menciptakan masyarakat yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab dalam membangun negara maju dan demokratis.

3.2. Pandangan Abraham Lincoln Terhadap Demokrasi

Abraham Lincoln memiliki pandangan yang sangat penting terkait konsep demokrasi. Ia hidup pada abad ke-19 dan menghadapi situasi yang sangat kritis, yaitu Perang Saudara Amerika (1861-1865). Pandangan-pandangan Lincoln tentang demokrasi tercermin dalam pidato-pidato dan tindakan-tindakannya, Ia menggambarkan demokrasi sebagai "pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dia berpegang pada prinsip bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang ras, agama, atau status sosial, memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Ia menekankan pentingnya perlindungan hak-hak asasi individu, termasuk hak atas kebebasan berbicara, hak memilih, dan hak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Lincoln juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah dan pemeliharaan sistem *check and balance*. Dia berpendapat bahwa kekuasaan harus dibagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak ada satu kekuatan tunggal yang mendominasi pemerintahan.[67] Abraham Lincoln menganggap pentingnya lembaga-lembaga independen yang

[67] Suprianto, Joko. 2019. *Demokrasi dan Sistem Check and Balance*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

dapat mengawasi dan mengimbangi tindakan pemerintah. Lincoln percaya pada pentingnya menjunjung tinggi hukum sebagai fondasi demokrasi yang kuat, Ia berpegang pada prinsip bahwa tidak ada orang atau lembaga yang berada di atas hukum, termasuk dirinya sendiri sebagai presiden.

Lincoln menyadari pentingnya pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dan berpengetahuan. Ia mendukung pendidikan umum dan percaya bahwa masyarakat yang terdidik akan lebih mampu berkontribusi secara positif dalam proses demokrasi. Selain itu, Lincoln juga memegang prinsip bahwa demokrasi harus melibatkan partisipasi aktif rakyat. Ia menekankan pentingnya diskusi dan perdebatan yang bebas dalam mencapai keputusan yang bijaksana. Menurutnya, demokrasi bukanlah hanya tentang hak memilih, tetapi juga melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Selama masa kepemimpinannya, Lincoln juga berjuang untuk menghapuskan perbudakan di Amerika Serikat. Ia melihat perbudakan sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan.

Upaya Lincoln dalam mengakhiri perbudakan kemudian menjadi bagian dari perjuangan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di Amerika Serikat.[68] Meskipun terjadi perang saudara yang brutal akibat upaya dalam mengakhiri perbudakan, Lincoln mengutamakan pengampunan dan rekonsiliasi antara Utara (Union) dan Selatan (Konfederasi) setelah perang berakhir. Dan ia berpendapat bahwa demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika negara tetap utuh. Dalam

[68] Wardhani, Arum S. 2017. *Perjuangan Abraham Lincoln Melawan Perbudakan*. Jakarta: Penerbit Serambi.

pandangannya, demokrasi adalah sebuah eksperimen yang terus-menerus, yang membutuhkan upaya dan komitmen dari seluruh masyarakat untuk menjaga dan memperbaikinya. Ia percaya bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling baik untuk melindungi hak-hak individu, mendorong kesejahteraan bersama, dan mewujudkan cita-cita keadilan.

3.2.1. Demokrasi Pemerintahan Rakyat

Pandangan demokrasi pemerintahan rakyat menurut Abraham Lincoln mencakup keyakinan bahwa kekuasaan pemerintah harus berasal dari rakyat dan pemerintah harus melayani kepentingan rakyat. Ia meyakini bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya pada kehendak mayoritas dan bertanggung jawab kepada warga negara. Lincoln percaya bahwa pemerintah harus dijalankan atas dasar perwakilan rakyat, di mana para pemimpin dipilih melalui pemilihan yang sah oleh warga negara. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan hak mereka untuk memberikan suara mereka dalam menentukan pemimpin dan kebijakan pemerintah. Pandangan Lincoln tentang demokrasi ini tercermin dalam pidato yang berjudul "*Address at Gettysburg, Pennsylvania. November 19, 1863*" Dalam pidato Lincoln menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".[69] Pernyataan ini mencerminkan pandangan Lincoln tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berpijak pada kehendak mayoritas dan bertujuan untuk melayani kepentingan rakyat secara keseluruhan. Lincoln juga meyakini bahwa pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memberi

[69] A. Faidi. *Op.cit.* hlm 235.

mandat kekuasaan. Dalam pidato-pidatonya, ia menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah, serta pentingnya mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka. Sebagai Presiden Amerika Serikat selama masa Perang Saudara, Lincoln berjuang untuk mempertahankan persatuan negara dan mencari dukungan dari mayoritas warga negara untuk upayanya tersebut.

Lincoln menganggap dirinya sebagai *"servant of the people"* (pelayan rakyat) yang ditugaskan untuk menjalankan kehendak rakyat dan membela nilai-nilai demokrasi. Pandangan Lincoln tentang demokrasi pemerintahan rakyat mencerminkan keyakinannya bahwa pemerintah yang berpijak pada kehendak mayoritas dan bertanggung jawab kepada rakyat adalah sistem pemerintahan yang efektif dan adil. Ia dianggap sebagai salah satu pemimpin yang paling dihormati dalam sejarah Amerika Serikat karena perannya dalam mempertahankan persatuan dan mendukung nilai-nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks sejarah, pidato *"Gettysburg"* oleh Abraham Lincoln tetap menjadi salah satu pidato yang paling berpengaruh dan menginspirasi dalam sejarah Amerika Serikat.[70]

3.2.2. Demokrasi Kesetaraan dan Kebebasan

Pandangan demokrasi kesetaraan dan kebebasan menurut Abraham Lincoln mencakup keyakinan bahwa semua manusia tercipta sama dan memiliki hak-hak yang sama. Lincoln meyakini bahwa demokrasi harus menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi semua warga negara, tanpa memandang ras, warna kulit, atau latar

[70] Doris, Kearns Goodwin. 2005. *Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln*. Simon & Schuster.

belakang sosial. Selain itu, ia menganggap kebebasan sebagai nilai penting dalam demokrasi, termasuk kebebasan individu dan kebebasan politik. Dalam pidato *Gettysburg* pada tanggal 19 November 1863, Lincoln menyatakan bahwa Amerika Serikat didirikan dengan prinsip bahwa *"all men are created equal"* (segala sesuatu diciptakan sama). Pandangan ini mencerminkan komitmen Lincoln terhadap kesetaraan sebagai landasan demokrasi yang kuat. Ia berjuang untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan ini diterapkan secara luas dan bahwa semua warga negara diperlakukan dengan adil dan sama di hadapan hukum.

Lincoln juga menganggap kebebasan sebagai nilai sentral dalam demokrasi. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam kebebasan dan memiliki otonomi dalam mengambil keputusan pribadi. Lincoln memperjuangkan kebebasan politik, termasuk hak untuk memberikan suara, kebebasan berbicara, dan kebebasan berserikat. Upaya Lincoln dalam menghapuskan perbudakan, yang diwujudkan melalui *"The Emancipation Proclamation"* adalah Proklamasi Emansipasi yang dikeluarkan oleh Presiden Lincoln pada tanggal 1 Januari 1863,[71] juga mencerminkan pandangannya tentang kesetaraan dan kebebasan. Ia berjuang untuk mengakhiri sistem yang melanggar hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat.

Proklamasi Emansipasi adalah langkah yang signifikan dalam mendukung kesetaraan dan kebebasan sebagai nilai-nilai yang mendasari demokrasi. Meskipun proklamasi ini tidak langsung mengakhiri perbudakan, namun langkah ini menjadi titik awal bagi perjuangan lebih lanjut untuk menghapuskan perbudakan dan

[71] A. Faidi. *Op.cit.* hlm 200.

menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan hak. Pandangan Lincoln tentang demokrasi kesetaraan dan kebebasan memberikan dasar untuk perjuangannya dalam menjaga persatuan negara, memastikan kesetaraan hak, dan memperluas kebebasan bagi semua warga negara. Ia dianggap sebagai salah satu pemimpin yang paling dihormati dalam sejarah Amerika Serikat karena perannya dalam memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dihormati dalam sistem pemerintahan.[72] Dalam keseluruhan, pandangan demokrasi kesetaraan dan kebebasan menurut pidato Gettysburg dan Proklamasi Emansipasi mencerminkan komitmen Abraham Lincoln untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi terwujud dalam kenyataan, termasuk melalui penghapusan perbudakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk hidup dalam kebebasan dan kesetaraan hak.

3.2.3. Demokrasi Dalam Prinsip-Prinsip Hukum Dan Konstitusi

Abraham Lincoln memiliki pandangan yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum dan konstitusi dalam konteks demokrasi, Dalam "*Lincoln's Second Inaugural Address"* Pidato ini diucapkan oleh Lincoln pada tanggal 4 Maret 1865 saat ia dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden Amerika Serikat. ia menyoroti pentingnya demokrasi yang berlandaskan pada hukum dan konstitusi dalam memulihkan dan menyatukan kembali Amerika Serikat yang terpecah selama Perang Saudara. Bagi Lincoln, demokrasi harus berfungsi dalam kerangka hukum dan menghormati konstitusi negara. Pandangannya tentang demokrasi di

[72] Mark E. Neely Jr. 2011. *"Lincoln and the Triumph of the Nation: Constitutional Conflict in the American Civil War"*. University of North Carolina Press.

prinsip-prinsip hukum dan konstitusi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana dia memandang keterkaitan keduanya. Mencakup keyakinannya bahwa pemerintahan yang baik harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku dan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan konstitusi negara. Lincoln percaya bahwa kekuasaan pemerintah tidak boleh dilakukan semena-mena atau sewenang-wenang, tetapi harus dijalankan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan.[73] Pemikiran Lincoln bahwa hukum dan konstitusi adalah landasan utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan masyarakat yang adil. Bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat berjalan dengan baik jika berada dalam kerangka hukum yang jelas dan dihormati. Ia berpendapat bahwa hukum harus menjadi pijakan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan menyelesaikan perselisihan. Pemerintah dan individu harus tunduk pada hukum yang berlaku, dan tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum.

Hukum adalah demokrasi sejati untuk melindungi hak-hak asasi individu. Ia percaya bahwa hukum harus menjamin kebebasan warga negara, melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, serta memastikan kesetaraan hak bagi semua orang, termasuk di antaranya hak untuk hidup dalam kebebasan dan kesetaraan. Lincoln memegang prinsip bahwa hukum harus melindungi hak asasi individu dalam demokrasi. Ia berpandangan bahwa setiap individu memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Salah satu contoh dari pandangan ini adalah upayanya dalam

---

[73] *"Lincoln's Second Inaugural Address"* (1865). President Abraham Lincoln: Inaugural Addresses. (Dari Perpustakaan Kongres Amerika Serikat)

mengakhiri perbudakan, karena ia melihatnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Lincoln menghormati dan menghargai konstitusi Amerika Serikat sebagai dokumen landasan yang mendasari pemerintahan dan memberikan kerangka kerja bagi demokrasi. Ia meyakini bahwa konstitusi harus dihormati dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara.

Lincoln berjuang untuk mempertahankan persatuan negara dan menghormati prinsip-prinsip konstitusional dalam upayanya untuk memelihara demokrasi. Dengan menghargai prinsip-prinsip hukum dan konstitusi, Lincoln berusaha menjaga stabilitas dan integritas negara. Ia memandang pentingnya menjalankan pemerintahan dengan menghormati hukum dan aturan yang telah ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam pandangan Lincoln, demokrasi yang kuat dan berkelanjutan hanya mungkin jika dijalankan dengan menghormati prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Dia menekankan perlunya pemerintahan yang adil, berdasarkan hukum yang sama untuk semua, dan mengakui hak-hak asasi manusia sebagai landasan demokrasi yang sejati. Pemikiran demokrasi Abraham Lincoln didalam prinsip hukum dan konstitusi adalah warisan yang terus menginspirasi orang-orang di seluruh dunia. Dia adalah seorang pemimpin yang berani dan visioner yang berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan bebas.